

BAB 1

Pendahuluan

Adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari pemerintahan berbentuk sentralisasi menjadi pemerintahan desentralisasi mengakibatkan semakin besarnya tuntutan akuntabilitas publik. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 yang berisikan tentang pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan dana, maka setiap daerah berhak mengatur keuangannya sendiri. Otonomi daerah juga dapat memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki setiap pemerintah daerah. Maju tidaknya dari suatu daerah ditentukan dengan bagaimana mengimplementasikan wewenang yang dimiliki setiap daerah. Untuk memajukan daerahnya, pemerintah dapat menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku dinegara. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan daerah, sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah mengharuskan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Ketidakmampuan menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di setiap lini pemerintahan menjadi salah satu penyebab lemahnya organisasi sehingga mengakibatkan munculnya penyimpangan pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Pratama et al., 2019). Menurut Mardiasmo(2009)menyatakan bahwa agar dapat mencapai akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, efektif, dan efisien terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka menjamin suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, mensejahterakan rakyat, serta memperbaiki tata kelola pemerintahannya (Fadila & Budiwitjaksono, 2022). Wujud dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik mengenai kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran adalah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi tahunan rencana strategik yang telah disusun pemerintah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah mereka lakukan kepada pihak pemberi amanah (principal) yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bias menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya, dan konsisten. Semakin cepat dan akurat informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah akan memberikan dampak positif bagi instansi (Widaryanti & Pancawardani, 2020)

Pemerintah Kota Semarang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan dan menyusun laporan keuangan. Namun pada saat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021, ada beberapa permasalahan yang ditemui BPK. Kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali menyampaikan, ada beberapa permasalahan yang ditemui seperti Piutang PBB yang belum terselesaikan, Pengelolaan aset tetap dan masalah belanja dengan BPJS Kesehatan. Meskipun ada beberapa masalah yang ditemui, Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa (WTP).

Pemberian WTP ini untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Kota Semarang meraih opini WTP ini sejak pemeriksaan tahun 2016 dan mampu mempertahankan opini tersebut enam kali beruntun atas LKPD tahun anggaran 2016 hingga 2021. Berita tersebut diumumkan oleh Subbagian Humas Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Mei 2022 (Amali, 2022).

Anggaran merupakan proses perencanaan kegiatan yang hendak dilakukan dimasa yang akan datang. Anggaran digunakan untuk membantu mencapai suatu sasaran atau tujuan. Kejelasan sasaran juga dapat mempermudah pemerintah untuk mencapai target atau sasaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menyusun target atau sasarnya jika sasaran anggaran tidak jelas. Selain itu, jika sasaran anggaran tidak jelas dapat menyebabkan pelaksana anggaran merasa bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Anggaran yang telah disusun bisa dijadikan tolak ukur dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sistem pelaporan. Sistem pelaporan juga dapat dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja yang dihasilkan selama satu periode. Pelaporan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya agar dapat melaksanakan tanggungjawab yang lebih baik lagi. Sistem pelaporan yang tidak baik juga dapat menyesatkan para pengguna laporan. Sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sistem pelaporan dapat dikatakan baik jika laporan telah disusun secara jujur, objektif dan transparan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik.

Pengendalian akuntansi juga dapat mengukur kegiatan yang dilakukan pemerintah, apakah telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektivitas. Pengendalian akuntansi juga membantu pemerintah dalam membuat keputusan. Selain itu juga mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu. Pengendalian akuntansi bisa memberikan solusi terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan suatu kinerja. Pengendalian akuntansi yang tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan terjadinya suatu penyimpangan. Hal ini dapat berakibat menurunnya tingkat akuntabilitas.

Penjelasan pada paragraf sebelumnya telah diteliti dalam beberapa penelitian, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Widaryanti & Pancawardani (2020), Fadila & Budiwitjaksono (2022) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Anisa & Haryanto (2022), Pratama et al., (2019) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Pratama et al., (2019), Widaryanti & Pancawardani (2020), Fadila & Budiwitjaksono (2022), Anisa & Haryanto (2022) menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Pratama et al., (2019), Anisa & Haryanto (2022) menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Widaryanti & Pancawardani (2020), Fadila & Budiwitjaksono (2022) menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melihat dari fenomena yang terjadi inilah yang membuat daya tarik dan mendorong untuk meneliti apakah kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi mempunyai peran penting. Peneliti ingin mengetahui apakah variabel – variabel yang dijelaskan sebelumnya dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didukung dengan jurnal penelitian terdahulu. Selain itu juga, tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu membuat peneliti ingin menguji ulang penelitian tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan dalam pengambilan tempat penelitian dan periode penelitian yang dilakukan sehingga

kebijakan – kebijakan yang diambil juga berbeda. Peneliti akan mengambil objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan tinjauan hasil penelitian terdahulu, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : (1) Apakah ada pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang? (2) Apakah ada pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang? (3) Apakah ada pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB 2

KajianPustaka

2.1 LandasanTeori

2.1.1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stewardship theory*. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, kesuksesan organisasi inilah yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori stewardship yang mengemukakan bahwa perilaku dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, mengutamakan kepentingan kolektif atau bersama daripada kepentingan pribadi dan selalu bersedia untuk melayani (Donaldson & Davis, 1991).

Hubungan teori stewardship dalam penelitian ini adalah pemerintah sebagai steward yang bertugas menjadi pengelola anggaran yang diharapkan dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus mengelola anggaran untuk mencapai tujuan yang maksimal sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Teori ini juga dapat menjadi dasar bahwa masyarakat dapat mempercayai pemerintah untuk mengelola segala urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Teori stewardship cocok diterapkan pada pemerintahan karena tidak berorientasi pada laba yang diperoleh tetapi lebih mengutamakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.2. Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban dari seseorang yang diamanati untuk mengatur sumber daya agar mencapai tujuan. Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas digunakan sebagai media penyampaian serta pengungkapan tercapainya tujuan organisasi dan pelaksanaan aktivitas kepada masyarakat. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanatkan (Widaryanti & Pancawardani, 2020). Saat ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Perpres No. 29 tahun 2014.

Saat ini tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini membuat pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2.1.3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk mencakup seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam bentuk angka (financial) dan berlaku untuk masa yang akan datang. Anggaran dijadikan pedoman bagi anggota organisasi dalam menjalankan rencana kerja. Anggaran memberikan sasaran, target, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi selama suatu periode tertentu. Anggaran juga berguna sebagai alat penilai aktivitas pada setiap bagian organisasi apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak. Tujuan dan sasaran anggaran harus disesuaikan dengan lima kriteria yaitu Spesifik, Terukur, Menantang, Realistis, dan Memiliki batas waktu.

Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan proses untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Anggaran juga memiliki salah satu karakteristik diantaranya yaitu

kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan (Aprilianti et al., 2020). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah organisasi dalam menyusun target – target anggaran, selanjutnya anggaran – anggaran yang akan disusun harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi. Sasaran anggaran yang tidak jelas menyebabkan pelaksana anggaran akan kesulitan untuk menerapkan anggaran yang ada (Pratama et al., 2019).

2.1.4. Sistem Pelaporan

Laporan keuangan dalam organisasi sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Adapun ciri laporan yang baik yaitu relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten), berdaya banding tinggi, berdaya uji, lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi (untuk yang rutin).

Sistem pelaporan merupakan sebuah tanggungjawab dalam pemberian informasi atas penggunaan anggaran kepada pihak eksternal, internal, maupun pihak yang mempunyai kepentingan. Pada instansi pemerintah, sistem pelaporan merupakan suatu mekanisme yang dibutuhkan untuk menyajikan laporan keuangan maupun laporan kinerja. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dibuat dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

2.1.5. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian Akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka organisasi harus mengembangkan pengendalian agar dapat diambil keputusan yang sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini yang termasuk dalam pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan (Mardiasmo, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel – variabel yang telah diteliti :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel		Hasil
		Dependen	Independen	
Sri Pebrianti, Nurna Aziza (2018)	Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control,	Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan Sasaran Anggaran	Berpengaruh Positif
			Pengendalian Akuntansi	Berpengaruh Positif
			Sistem Pelaporan	Berpengaruh Positif

	Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies		Kepatuhan Terhadap Peraturan	Berpengaruh Positif
Mulyadi AR, Syamsidar, Dedy E (2018)	Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh)	Akuntabilitas Kinerja	Sistem Pelaporan	Berpengaruh Positif
			Kejelasan Sasaran Anggaran	Berpengaruh Positif
Rio Pratama, Henri Agustin, Salma Taqwa (2019)	Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja	Pengendalian Akuntansi	Berpengaruh Positif
			Sistem Pelaporan	Berpengaruh Positif
			Kejelasan Sasaran Anggaran	Tidak berpengaruh
Evada Dewata, Yuliana Sari, Hadi Jauhari, Tifani Dwi Lestari (2020)	Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas	Akuntabilitas Kinerja	Ketaatan pada Peraturan Perundangan	Berpengaruh Positif
			Sistem Pelaporan	Berpengaruh Positif

	s Kinerja Instansi Pemerintah			
Widaryanti , NurulLatifah P (2020)	Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja	Pengendalian Akuntansi	Tidak berpengaruh
			Sistem Pelaporan	Berpengaruh Positif
			Kejelasan Sasaran Anggaran	Berpengaruh Positif
Indah Nur Anisa, Haryanto (2022)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19	Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan Sasaran Anggaran	Tidak berpengaruh
			Pengendalian Akuntansi	Berpengaruh Positif
			Sistem Pelaporan	Berpengaruh Positif
Saprila Nur Fadila, Gideon Setyo Budi W (2022)	Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan Sasaran Anggaran	Berpengaruh Positif
			Pengendalian Akuntansi	Tidak berpengaruh
			Sistem Pelaporan	Berpengaruh Positif
			Kualitas SDM	Tidak berpengaruh

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan anggaran yang telah ditetapkan secara jelas yang sesuai dengan tujuan agar dapat dipahami oleh organisasi yang bertanggung jawab. Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai dalam meningkatkan kinerja. Sasaran

yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran harus jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh organisasi yang bertanggungjawab dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan(Widaryanti & Pancawardani, 2020).

Hal ini berhubungan dengan teori stewardship dimana pemerintah sebagai pihak yang diamanati untuk mengelola anggaran diharapkan bisa mencapai tujuan. Dengan anggaran yang jelas dapat membantu pegawai dalam dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal itu akan mempengaruhi pegawai untuk bekerja keras demi kepentingan masyarakat. Bila kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu juga sebaliknya, Bila kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan semakin rendah, maka semakin rendah juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pebrianti & Aziza (2018), AR et al., (2018),Widaryanti & Pancawardani (2020), Fadila & Budiwitjaksono (2022) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.2. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaporan juga wujud dari akuntabilitas, maka dari itu pemerintah harus menyajikan laporan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan juga diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada suatu rencana atau pada saat mengimplementasikan suatu anggaran. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang baik akan menghasilkan data yang dilaporkan secara rinci dengan menyajikan informasi secara transparan, dan akuntabel mengenai keputusan – keputusan yang telah diambil pemerintah pada satu periode sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini berhubungan dengan teori stewardship dimana sistem pelaporan akan membantu pemerintah dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melaporkan hasil kerjanya sebagai wujud akuntabilitas. Dengan demikian masyarakat dapat melihat hasil yang telah dicapai pemerintah sehingga masyarakat yakin kepada pemerintah untuk mengelola apa yang diamanatkan dengan baik. Bila semakin tinggi sistem pelaporan maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja pemerintah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sistem pelaporan, maka akan semakin rendah akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pebrianti & Aziza (2018), AR et al., (2018), Pratama et al., (2019), Dewata et al., (2020), Widaryanti & Pancawardani, (2020), Fadila & Budiwitjaksono (2022), Anisa & Haryanto (2022) menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.3. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adanya pengendalian akuntansi, pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggungjawab yang dilakukan. Penggunaan pengendalian akuntansi dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik lagi, mengontrol aktivitas supaya lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan membantu memilih alternatif terbaik dalam setiap

kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Pengendalian akuntansi juga diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang kemungkinan terjadi yang dapat dilakukan oleh orang – orang tertentu. Pengendalian akuntansi juga dapat menilai apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif pelayanan yang telah diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat (Widaryanti & Pancawardani, 2020).

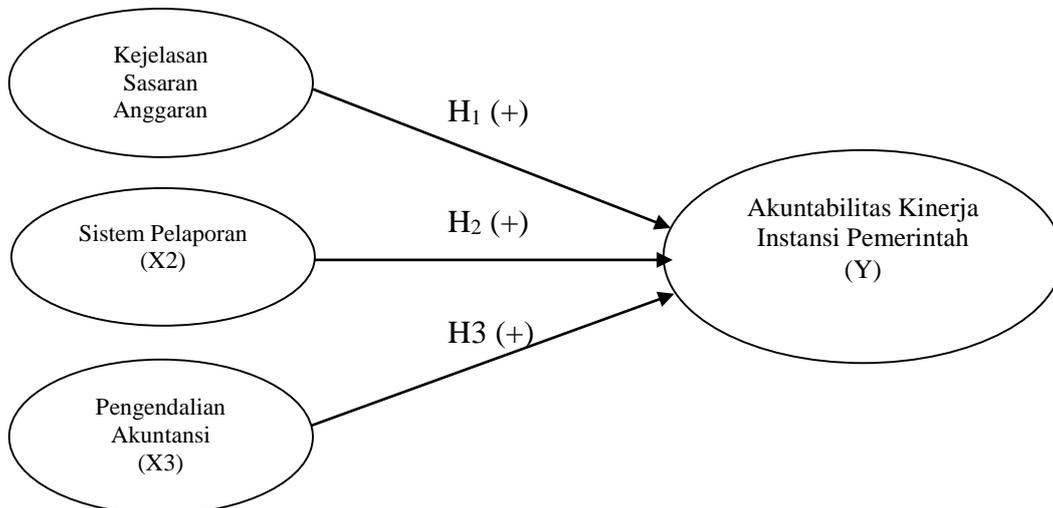
Hal ini berhubungan dengan teori stewardship dimana pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat menilai apakah pemerintah dapat menyelesaikan setiap kasus dan masalah yang kemungkinan dapat terjadi. Hal tersebut bisa menjadi ukuran apakah pemerintah sudah melaksanakan kegiatan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila semakin tinggi petugas pemerintahan dalam menyusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan baik untuk proses pengambilan keputusan maka tingkat terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga semakin baik. Begitu juga sebaliknya semakin rendah petugas pemerintahan dalam menyusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan buruk untuk proses pengambilan keputusan maka tingkat terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga semakin buruk.

Penelitian yang dilakukan Pebrianti & Aziza (2018), Pratama et al., (2019), Anisa & Haryanto (2022) menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4 Model Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Model Penelitian



BAB 3

Metode Penelitian

3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Semarang dengan jumlah 51 instansi. Penelitian ini mengambil populasi di Kota Semarang karena dilihat dari fenomena yang ditemukan BPK adanya beberapa permasalahan seperti Piutang PBB yang belum terselesaikan, Pengelolaan aset tetap dan masalah belanja dengan BPJS Kesehatan. Meskipun ada beberapa masalah yang ditemui, Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Oleh karena itu, populasi yang digunakan instansi yang ada di Kota Semarang.

3.2 Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* karena teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang di ambil nantinya berasal dari sumber yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun Kriteria yang dipilih antara lain :

1. Pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi dalam penyajian dan pertanggungjawaban atas laporan yang dibuat. Salah satu pejabat tersebut Kepala Subbagian Keuangan beserta staffnya.
2. Pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing instansi.
3. OPD yang telah ditentukan meliputi Dinas, Badan, dan Satuan Kerja yang ada di Kota Semarang yang berjumlah 33 instansi.

Tabel 3.1

Jabatan	Jumlah
Kepala Subbagian keuangan	33
Staff keuangan	66
Jumlah	99

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Mardiasmo(2018), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diukur menggunakan 4 indikator yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan supaya anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Menurut Agustin & Rahmawati Dewi (2018), kejelasan sasaran anggaran dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu :

1. Kesesuaian rencana kerja dan anggaran dengan RAPBD
2. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran secara efektif
4. Faktor – faktor yang mendukung tujuan instansi
5. Ketepatan anggaran dan realisasi

3.3.2.2 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan sebuah tanggung jawab dalam pemberian informasi atas penggunaan anggaran kepada pihak eksternal, internal, maupun pihak yang mempunyai kepentingan. Sistem pelaporan juga dapat menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Menurut Widaryanti & Pancawardani (2020), sistem pelaporan dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu :

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap.
2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi.
3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus.
4. Laporan keuangan dapat diuji.
5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

3.3.2.3 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian Akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Widaryanti & Pancawardani (2020), pengendalian akuntansi dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu :

1. Pemisahan fungsi
2. Prosedur pemberian wewenang
3. Prosedur dokumentasi
4. Prosedur dan catatan akuntansi

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode yang dipakai untuk memperoleh data tersebut menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara memberi pertanyaan kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden secara langsung ke tempat yang dituju untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali ketika sudah diisi. Setelah itu data yang diperoleh dapat diolah kembali. Data akan diolah menggunakan alat analisis SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) Versi 18.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator. Kemudian indikator tersebut akan dijadikan dasar untuk menyusun yang dapat dijadikan pertanyaan atau pernyataan. Jawaban dari setiap pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan skala likert akan menyajikan banyak pilihan. Penelitian ini akan menggunakan 5 (lima) point dengan skor yang berbeda. Adapun skor dan jawaban disetiap pertanyaan yang akan digunakan yaitu :

- Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- Skor 2 : Tidak Setuju (TS)
- Skor 3 : Netral (N)

Skor 4 : Setuju (S)

Skor 5 : Sangat Setuju (SS)

3.4 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang Pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean) standar deviasi, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2021).

3.5.2 Uji Kualitas Data

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji statistik yang digunakan dalam mengukur kuesioner apakah sah atau valid tidaknya kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2021). Uji validitas sendiri merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan kuesioner dalam menerapkan fungsinya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table, jika r hitung $>$ r tabel dan mendapat nilai positif maka indikator tersebut dinyatakan valid (Agustin & Rahmawati Dewi, 2018).

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan stabil. Teknik yang di gunakan untuk menjawab pertanyaan di sini adalah teknik *Cronbach's Alpha* dimana semakin besar nilai $\alpha > 0,7$ (mendekati 1) maka akan semakin reliabel data tersebut (Ghozali, 2021).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali(2021) uji normalitas bertujuan untuk memverifikasi terdapat variabel pengganggu atau tidak dalam model regresi, variable pengganggu atau residual tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah distribusi data yang mendekati ataupun normal. Uji normalitas digunakan dengan uji kolmogorov – smirnov yaitu dimana jika signifikasi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan statik parametrik begitu pula sebaliknya.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen menandakan bahwa model regresi tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Tolerance yang memiliki nilai $> 0,1$ dan VIF yang memiliki nilai < 10 menunjukkan tidak terjadinya gejala multikolinearitas.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021) pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan kepengamatan lainnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Scatterplot guna mengetahui adanya heteroskedastisitas. Yang mana dengan menggunakan Scatterplot ini, ditentukan berdasarkan deteksi ada atau tidaknya titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar setelah itu menyempit) pada grafik Scatterplot maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran

X₂ = Sistem Pelaporan

X₃ = Pengendalian Akuntansi

α = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

e = Error

3.5.5 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa jelas kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jelas kemampuan model variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dalam koefisien ini berada diantara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2021).

3.5.6 Uji – F

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Biasanya uji ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F sendiri memiliki kriteria yaitu apabila probabilitas > 0,05 maka H₁ ditolak namun jika < 0,05 maka H₁ diterima (Ghozali, 2021).

3.5.7 Uji Statistik – t

Uji statistik t (t-test) digunakan untuk mengukur hubungan antara masing-masing variable dependen dengan variable independent, untuk mengukur hubungan ini menggunakan regresi linear berganda. Jika nilai pada table signifikan < α (0,05) maka H₁ diterima atau variable independent terdapat hubungan signifikan terhadap variable dependen (Ghozali, 2021).